

**RENJA - SKPD
DINAS SOSIAL
TAHUN 2018**



**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Kamboja No. 3 Kandangan 71212, Telpon/Fax (0517) 21123**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	21
3.3 Program dan Kegiatan.....	22
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada Sekretariat	5
Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.....	7
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.....	7
Tabel 2.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	8
Tabel 2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinsosnakertrans Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2016.....	10
Tabel 2.7 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	15
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017.....	23
Tabel 3.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis karena menjadi dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kab. HSS.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan di bidang sosial tahun lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
17. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menterjemahkan secara teknis pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS;
- b. Menyusun perencanaan pembangunan yang lebih fungsional dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang sosial sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;

- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang sosial baik secara internal maupun eksternal;
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja bidang sosial;
- f. Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan dari Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Sosial Kab. HSS;
- b. Menciptakan sinergitas perencanaan, kepastian, keterpaduan, keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- c. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan**, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu**, berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD; analisis kinerja pelayanan SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Review terhadap rancangan awal RKPDP; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.
- BAB IV Penutup**, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja SKPD Tahun 2016 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2016. Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun lalu dari 35 kegiatan yang direncanakan terdapat 37 kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2016 atau bertambah 2 kegiatan dari yang direncanakan. Penambahan kegiatan ini terjadi pada kegiatan :

1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD, merupakan kegiatan yang bersifat rutin berupa penyelenggaraan pameran dan pawai pembangunan.
2. Kegiatan Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin, merupakan kegiatan penyaluran beras gratis untuk masyarakat miskin. Kegiatan ini sebelumnya berada pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS.

Untuk capaian realisasi program dan kegiatan TA. 2016 yang diambil dari Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinsosnakertrans Kab. HSS Tahun 2016 Tanggal 31 Desember 2016, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016
pada SEKRETARIAT

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	4.029.027.000,00	3.561.883.804,00	88,41	100
	1. Gaji dan Tunjangan	2.865.452.000,00	2.554.924.524,00	89,16	100
	2. Tambahan Penghasilan	1.163.575.000,00	1.006.959.280,00	86,54	100
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1.870.000,00	1.560.000,00	83,42	100
	2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90.190.831,00	52.683.836,00	58,41	100
	3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.150.000,00	7.180.100,00	44,46	100
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000,00	11.000.000,00	100	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	5. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.450.000,00	15.750.000,00	95,74	100
	6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	46.412.100,00	46.212.100,00	99,57	100
	7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.459.600,00	17.656.100,00	95,65	100
	8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.409.000,00	3.409.000,00	100	100
	9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	118.176.200,00	118.176.200,00	100	100
	10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan	4.800.000,00	3.900.000,00	81,25	100
	11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	13.332.000,00	12.840.000,00	96,31	100
	12. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	323.700.000,00	323.550.023,00	99,95	100
	13. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	60.600.000,00	59.800.000,00	98,68	100
	14. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.000.000,00	39.950.000,00	99,88	100
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	61.000.000,00	59.863.840,00	98,14	100
	2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.150.000,00	77.550.000,00	94,40	100
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.200.000,00	6.200.000,00	100	100
	JUMLAH	4.942.926.731,00	4.419.165.003,00	89,40	100

Tabel 2.2

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pada BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	1. Kegiatan Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	37.503.000,00	37.280.000,00	99,41	100
	2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	350.018.800,00	334.279.700,00	95,50	100
	3. Kegiatan Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	223.563.200,00	146.231.250,00	65,41	100
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	1. Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	207.722.000,00	163.064.000,00	78,50	100
3.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	1. Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	590.504.900,00	515.177.900,00	87,24	100
JUMLAH		1.409.311.900,00	1.196.032.850,00	84,87	100

Tabel 2.3

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016

Pada BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program pembinaan anak terlantar				
	1. Kegiatan Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	238.810.000,00	237.284.000,00	99,36	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
2.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.	163.146.000,00	146.196.000,00	89,61	100
3.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	135.400.000,00	135.138.000,00	99,81	100
4.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	157.054.000,00	149.174.000,00	94,98	100
JUMLAH		694.410.000,00	667.792.000,00	96,17	100

Tabel 2.4

**Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016
Pada BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	459.503.000,00	446.638.000,00	97,20	100
2.	Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	894.725.000,00	873.435.000,00	97,62	100
3.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	308.377.500,00	284.077.000,00	92,12	100
JUMLAH		767.880.500,00	730.715.000,00	95,16	100

Tabel 2.5

**Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016
Pada BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
	1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	17.814.000,00	16.314.000,00	91,58	100
	2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Berbasis Padat Karya	287.054.000,00	285.879.000,00	99,59	100
	3. Kegiatan Pelatihan keterampilan service sepeda motor	113.390.000,00	110.783.150,00	97,70	100
	4. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Menjahit	61.842.000,00	61.313.000,00	99,14	100
2.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				
	1. Kegiatan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	18.094.000,00	18.094.000,00	100	100
	2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan hukum terhadap K-3	35.461.000,00	34.870.000,00	98,33	100
	3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Peraturan Ketenagakerjaan	20.244.000,00	20.244.000,00	100	100
JUMLAH		553.899.000,00	436.714.000,00	78,84	100

Terdapatnya sisa anggaran tersebut berkenaan dengan adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa serta adanya perubahan regulasi dalam memperoleh bantuan sosial.

Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016, secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab. HSS Tahun 2016**

No	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Target Renstra Tahun 2016	Realisasi	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	81,22	Capaian kinerja 102,81%
2	Persentase keluarga miskin dengan tingkat kesejahteraan meningkat	70%	98,35%	Capaian kinerja 140,50%
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	80%	89,53%	Capaian kinerja 111,91%
4	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	36,87%	31,73%	Capaian kinerja 86,06%
5	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	60%	100%	Capaian kinerja 166,67%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi umumnya telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat satu sasaran renstra yang belum tercapai. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk menjalankan program kegiatan dalam rangka memenuhi volume dan target Renstra yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. HSS pada tahun 2016 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

I. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada SEKRETARIAT**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan rekening telepon, air dan listrik kantor.

- c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service 16 buah kendaraan dinas selama satu tahun.
 - d. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah melakukan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
 - e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun.
 - f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.
 - g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.
 - h. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
 - i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan bahan bacaan kantor (surat kabar).
 - j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat dan tamu.
 - k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.
 - l. Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan jasa non PNS
 - m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
- a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah berhasil melakukan penyediaan bahan pameran kandang expo dan pawai pembangunan tahun 2016, melakukan penambahan daya dan perbaikan instalasi listrik gedung kantor.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil membayar BBM untuk 5 buah kendaraan dinas/operasional dan penggantian suku cadang untuk 4 buah kendaraan dinas.

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil menyusun laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun.

II. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Kegiatan Pendampingan usaha bagi keluarga miskin, telah berhasil memberikan fasilitasi Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan memberikan fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomis Produktif (KUBE) kepada 569 KK dari keluarga miskin.
 - Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, telah berhasil merehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 810 buah terdiri dari 765 buah melalui anggaran murni dan 45 buah melalui anggaran perubahan.
 - Kegiatan Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin, telah berhasil menyalurkan bantuan beras miskin gratis/beras sejahtera kepada 15.241 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, telah berhasil dilaksanakan pengelolaan sekretariat UPPKH Kab. HSS untuk menunjang pelaksanaan pemberian jaminan sosial kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Terdapat sebanyak 4.930 KSM yang telah diberikan jaminan sosial dari 4.930 KSM yang terdata. Sehingga seluruh peserta telah menerima bantuan.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, telah berhasil membina 7 jenis potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yaitu organisasi sosial (Forum Kesejahteraan Sosial Anak), Karang Taruna, TKSK, PSM, WKBSM, K3S dan LK3.

III. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Program pembinaan anak terlantar

- Kegiatan Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar, telah berhasil mengirim 40 orang anak terlantar untuk dibina di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan pemberian bantuan peralatan modal usaha setelah selesai mengikuti pembinaan bakat dan keterampilan. Selain itu melalui kegiatan ini juga telah dilaksanakan Program Berupaya (Bersama untuk Peduli Anak Yatim) yaitu pemberian bantuan sosial berupa santunan pendidikan sebesar Rp. 1.200.000/orang/tahun kepada anak yatim dari keluarga miskin sebanyak 916 orang dari 1.033 orang yang terdata. Selain itu diberikan pula bantuan sosial dari Program Sosial Kesejahteraan Anak (PKSA) sebesar Rp. 1.200.000/orang/tahun kepada kepada 177 orang anak dari keluarga miskin dari 178 orang yang terdata. Tidak terealisasikannya seluruh target penerima bantuan disebabkan hasil verifikasi terhadap data yang ada tidak semua calon penerima bantuan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti telah pindah alamat dan umur penerima tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia, pemberian bantuan bahan pangan (sembako) kepada 200 orang lanjut usia terlantar/dari keluarga miskin. Selain itu diberikan pula bantuan sosial berupa jaminan hidup sebesar Rp. 2.700.000/orang/tahun kepada 1.636 orang dari 2.075 orang lanjut usia terlantar/dari keluarga miskin yang diusulkan untuk menerima bantuan. Tidak terealisasikannya seluruh target penerima bantuan disebabkan hasil verifikasi terhadap data yang ada tidak semua calon penerima bantuan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti ada calon penerima yang telah pindah alamat, dianggap dalam kategori mampu dan ada penerima yang telah meninggal dunia.

3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, telah berhasil melaksanakan pemberian bantuan bahan makanan pokok kepada 160 orang penyandang cacat dari keluarga miskin. Selain itu dalam kegiatan ini juga diberikan bantuan alat bantu tubuh bagi penyandang cacat serta

pengiriman ke panti rehabilitasi penyandang cacat dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 9 orang. Seluruh calon penerima bantuan yang diusulkan telah menerima bantuan karena telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial

- Kegiatan Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial, telah berhasil memberikan penanganan terhadap masyarakat terlantar dan penyandang penyakit sosial sesuai kasus/masalah sosial yang terjadi sebanyak 31 orang dari 85 orang yang ditargetkan. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan bimbingan kewirausahaan kepada wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 20 orang. Anggaran pada kegiatan ini merupakan dana persediaan untuk penanganan masyarakat terlantar dan permasalahan sosial yang terjadi sehingga digunakan sesuai kasus/masalah sosial yang terjadi.

IV. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana, telah berhasil melaksanakan pemberian bantuan bahan makanan dan peralatan dapur terhadap korban bencana sebanyak 861 jiwa dari target penerima sebanyak 1.300 orang. Anggaran pada bantuan untuk korban bencana merupakan dana persediaan penanggulangan bencana sehingga digunakan sesuai data jumlah korban bencana yang memerlukan bantuan.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Pembinaan Kepeloporan, Keberintisan dan Kepahlawanan termasuk bagi korban bencana, telah berhasil memberikan santunan kepada 134 orang veteran pejuang dan janda veteran pejuang.

V. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja, telah berhasil melaksanakan sosialisasi pasar kerja kepada calon pencari kerja sebanyak 150 orang.
- Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis padat karya, telah berhasil melaksanakan kegiatan padat karya di Desa Sarang Halang

Kecamatan Sungai Raya untuk pembangunan jalan desa sepanjang 532 x 1,5 meter dengan melibatkan 88 orang tenaga kerja.

- Kegiatan Pelatihan keterampilan service sepeda motor, telah berhasil melaksanakan pelatihan servise sepeda motor kepada 32 orang pencari kerja.
- Kegiatan Pelatihan keterampilan menjahit, telah berhasil melatih para pencari kerja usia produktif sebanyak 16 orang di bidang keterampilan menjahit.

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Kegiatan peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja, telah berhasil melaksanakan survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebanyak 12 kali survei ini diperlukan dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi.
- Kegiatan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, telah berhasil menyelesaikan 6 kasus hubungan industrial.
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Peraturan Ketenagakerjaan telah berhasil melaksanakan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan seperti peraturan norma kerja, norma K3 dan Upah Minimum Provinsi kepada 90 orang perwakilan dari perusahaan yang ada di Kab. HSS.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Kajian terhadap Visi Misi Kabupaten dan Kajian terhadap Renstra K/L, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Sosial berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan; 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kemiskinan di Kab. HSS tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi KalSel tahun 2013 sebesar 4,76 %. Untuk itu kesejahteraan

<p>penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan.</p>	<p>negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksanan Teknis Dinas;</p> <p>6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.</p>	<p>masyarakat Kab. HSS perlu ditingkatkan guna menurunkan angka kemiskinan;</p> <p>2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan karena sangat dibutuhkan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial;</p> <p>3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan;</p> <p>4. Nilai-nilai kepahlawanan perlu dilestarikan agar pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat tidak melunturkan rasa patriotisme, semangat juang ,semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang;</p>
--	---	--

		5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.
--	--	--

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain adalah:

- Semakin meningkatnya permasalahan sosial yang ada sementara program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada.
- Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Masih terbatasnya data dan informasi, aspek perencanaan serta sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan pembangunan bidang sosial.
- Masih terbatasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang sosial.

Permasalahan tersebut di atas dapat diberikan solusi dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Penanganan permasalahan sosial dengan menggunakan skala prioritas.
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.
- Melibatkan peran aktif masyarakat, orsos, ormas, pihak swasta dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan bidang sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terpola pada satu tujuan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, terarah, terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

RKPD yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan sinkronisasi data masukan dari kondisi tertentu dan semua Rencana Kerja SKPD yang memuat kegiatan dan program serta kerangka anggaran SKPD.

Pada Renja Tahun 2018 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Revisi Renstra Dinas Sosial Kab. HSS.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Pendampingan usaha bagi keluarga miskin
- Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin
- Koordinasi program rumah sejahtera

-	Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
-	Pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar
-	Perlindungan sosial bagi korban bencana
-	Pelayanan sosial bagi anak terlantar
6.	Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari kegiatan :
-	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
7.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari kegiatan :
-	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
8.	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PKS, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya, terdiri dari kegiatan :
-	Peningkatan pelayanan sosial bagi eks panyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar
-	Pemberdayaan sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
9.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
-	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan
-	Pembinaan Pembinaan Karang Taruna
-	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
-	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
-	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
-	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
-	Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
-	Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat
10.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
-	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Pada Renja Dinas Sosial Tahun 2018 ini, mendapat 1 (satu) tambahan Program dan Kegiatan dikarenakan adanya pelimpahan kegiatan dari bagian Ekobang Setda Kab. HSS yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Program baru) dan kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa (Kegiatan baru) berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Nomor 500/802-SD/Ekobang, Perihal

Pelimpahan Tanggungjawab Pelaksana Kegiatan. Kegiatan ini berupa fasilitasi terhadap Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (Samping Desa Sejahtera) yang berkaitan dengan salah satu sasaran dalam Revisi Renstra Dinas Sosial Kab. HSS yaitu “Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)” dengan indikator “Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS”.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Musrenbang Tingkat Desa,
2. Musrenbang Tingkat Kecamatan,
3. Musrenbang Tingkat Kabupaten,
4. Musrenbang Tingkat Provinsi,
5. Informasi dari masyarakat, PSM, Orsos, Ormas, serta instansi lain tentang permasalahan sosial yang terjadi.
6. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan kegiatan dan programnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepada pihak swasta, masyarakat, PSM, Ormas, Tagana dan Orsos dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan; dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. HSS

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kab. HSS sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
- 7) Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kab. HSS sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);

- 7) Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

b. Tujuan dan sasaran Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2014-2018 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Sosial Tahun Anggaran 2018;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian kinerja Program/Kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun Anggaran 2018;
- c. Menciptakan sinergitas perencanaan, kepastian, keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Sosial Kab. HSS.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Tercapainya pelaksanaan tugas bagi semua personil untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pembangunan sosial sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- b. Tersedianya kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial;
- c. Tersedianya informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja Dinas Sosial Kab. HSS;
- d. Terkendalinya kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial secara internal maupun eksternal.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1				Wajib					
1	13			Sosial					
		1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			01	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah materai untuk administrasi kantor	Dinas Sosial	580 lembar	3.070.000	APBD II
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	Dinas Sosial	15 rekening	93.602.000	APBD II
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Mobil operasional laik jalan 5 Unit; Kendaraan operasional laik jalan 13 Unit	Dinas Sosial	5 Unit; 13 Unit	16.250.000	APBD II
			07	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD.	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai pembangunan (Mobil Hias) dan pameran pembangunan (Kandangan Expo)	Dinas Sosial	2 kegiatan	11.000.000	APBD II
			09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	Dinas Sosial	44 unit	15.050.000	APBD II
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Dinas Sosial	45 jenis	50.995.500	APBD II
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	Dinas Sosial	5 jenis	11.323.500	APBD II

		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	8 jenis	3.409.000	APBD II
		13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	22 jenis	56.160.000	APBD II
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	48 eksemplar	4.800.000	APBD II
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum untuk kegiatan kantor yang disediakan	Dinas Sosial	11 bulan	17.540.000	APBD II
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pembayaran SPPD ke luar daerah yang disediakan	Dinas Sosial	1 tahun	348.800.000	APBD II
		19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	Jumlah pembayaran honorarium Non PNS	Dinas Sosial	8 orang	81.850.000	APBD II
		20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pembayaran SPPD dalam daerah yang disediakan	Dinas Sosial	1 tahun	60.000.000	APBD II
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		07	Pembangunan perlengkapan gedung kantor	Jumlah tempat parkir yang dibangun dengan kondisi baik; Jumlah aksesoris taman dalam ruangan yang dibuat	Dinas Sosial	1 paket; 2 paket	86.360.000	APBD II
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dengan kondisi baik; Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Dinas Sosial	2 buah; 1 lokasi	122.000.000	APBD II
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Monil operasional laik jalan 5 unit; kendaraan operasional laik jalan 13 unit	Dinas Sosial	5 Unit; 13 Unit	87.100.000	APBD II
	06		Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					

			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD.	Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu 1 Laporan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselesaikan tepat waktu 1 Laporan; Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu 14 Laporan	Dinas Sosial	1 Laporan; 1 Laporan; 14 Laporan	5.202.000	APBD II
1	13	15		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
			03	Pendampingan usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) 130 KK; Jumlah KK dalam eks Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan UEP 10 KK;	Kab. HSS	130 KK; 10 KK	57.898.000	APBD II
			08	Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra)	Kab. HSS	15.238 RTS-PM	279.533.000	APBD II
			11	Penyediaan Program Rumah Sejahtera	Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi	Kab. HSS	425 buah	153.196.000	APBD II
			12	Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. HSS	Kab. HSS	100 %	327.925.000	APBD II

1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
			01	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dan Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	Kab. HSS	2.794 orang	115.648.000	APBD II
			14	Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana; Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana	Kab. HSS	100 %; 76 orang	477.968.000	APBD II
			15	Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	Kab. HSS	1.117 orang	82.531.000	APBD II
		17		Pembinaan Anak Terlantar					
			04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	Kab. HSS	1.117 orang	122.285.000	APBD II

1	13	18		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma					
			04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	Kab. HSS	196 orang	154.888.000	APBD II
		20		Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PKS, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya					
			06	Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 25 Orang; Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 5 Orang; Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial sesuai dengan standar	Kab. HSS	25 Orang; 5 Orang; 70 %	111.050.000	APBD II
			07	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	Kab. HSS	60 orang	70.008.000	APBD II
1	13	21		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					
			05	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan.	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima santunan/bantuan sosial	Kab. HSS	104 orang	184.800.000	APBD II

			10	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah organisasi sosial yang aktif	Kab. HSS	25 organisasi	144.277.500	APBD II
			11	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif	Kab. HSS	11 orang	84.443.000	APBD II
			12	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif	Kab. HSS	25 orang	172.307.500	APBD II
			13	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3)	Kab. HSS	1 lembaga	23.388.000	APBD II
			14	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang aktif	Kab. HSS	5 buah	3.200.000	APBD II
			15	Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA)	Kab. HSS	14 lembaga	19.038.000	APBD II
			16	Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat)	Kab. HSS	1 lembaga	6.880.000	APBD II
1	7	26		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					
			01	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang aktif	Kab. HSS	148 orang	4.344.289.000	APBD II
JUMLAH TOTAL ANGGARAN								8.010.065.000	

Tabel 3.2
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	85,81%
2	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	79,39%
3	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	10%
5	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	40%
6	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	21,27%
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20%
7	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%
8	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	50%
9	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	100%
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100%
10	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

BAB IV PENUTUP

Secara spesifik Rencana Kerja (Renja) 2018 merupakan kelanjutan yang ditopang dengan Renja terdahulu yang fokus pada target baik agenda, strategi, kebijakan maupun kegiatan. Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS ini berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini disusun untuk menterjemahkan secara teknis pelaksanaan RPJP dan RPJMD Kab. HSS. Untuk itu diperlukan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja. Apabila ada masukan dan kritik yang sifatnya konstruktif akan diterjemahkan dalam program-program yang diusulkan. Hal ini untuk mendorong proses penyusunan program yang transparan, dan munculnya kesadaran untuk mengawasi proses penyusunan serta implementasi program dari masyarakat.

Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menerapkan prinsi-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mendorong keberhasilan pembangunan bidang sosial, Rencana Kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan kontrol terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi Dinas Sosial Kab. HSS.

Keberhasilan Rencana Kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak baik lintas SKPD, legislatif dan masyarakat. Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kandangan, Juni 2017

Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,



Hj. SITLER MA, S.Sos, M.AP
Perwakilan Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			0			Non Urusan						
			0 0			-						
1	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81				0	
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	0 0 1	01 Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah materai untuk administrasi kantor 580 Lembar;	580 Lembar	3,070,000	Pendapatan Daerah		0 Lembar	0
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	0 0 1	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet 15 Rekening;	15 Rekening	93,602,000	Pendapatan Daerah		0 Rekening	0
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	0 0 1	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil operasional laik jalan 5 Unit; Kendaraan operasional laik jalan 13 Unit	5 Unit; 13 Unit	16,250,000	Pendapatan Daerah		0 Unit; 0 Unit	0
			0 0 1	07 Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai pembangunan (Mobil Hias) dan pameran pembangunan (Kandangan Expo) 2 Kegiatan;	2 Kegiatan	11,000,000	Pendapatan Daerah		0 Kegiatan	0
			0 0 1	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara 44 Unit;	43 Unit	15,050,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
			0 0 1	10 Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 45 Jenis;	45 Jenis	50,995,500	Pendapatan Daerah		0 Jenis	0
			0 0 1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan 6 Jenis;	6 Jenis	11,323,500	Pendapatan Daerah		0 Jenis	0
			0 0 1	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 8 Jenis;	8 Jenis	3,409,000	Pendapatan Daerah		0 Jenis	0
			0 0 1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 22 Jenis;	22 Jenis	56,160,000	Pendapatan Daerah		0 Jenis	0
			0 0 1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan kantor yang disediakan 48 eksemplar;	48 Eksemplar	4,800,000	Pendapatan Daerah		0 Surat Kabar Harian	0
			0 0 1	17 Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makan minum untuk kegiatan kantor yang disediakan 11 Bulan;	11 Bulan	17,540,000	Pendapatan Daerah		0 Bulan	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)				
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
2	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Peresentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	0	0	1	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah pembayaran SPPD ke luar daerah yang disediakan 1 Tahun;	1 Tahun	349,400,000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0	
			0	0	1	19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Jumlah pembayaran honorarium Non PNS 8 Orang;	8 Orang	81,250,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0	
			0	0	1	20	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten HSS	Jumlah pembayaran SPPD dalam daerah yang disediakan 1 Tahun;	1 Tahun	60,000,000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0	
			0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ; Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	81; 100%				0	
			0	0	2		Pembangunan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah tempat parkir yang dibangun dengan kondisi baik 1 Paket; Jumlah aksesoris taman dalam ruangan yang dibuat 2 Paket	1 Paket; 2 Paket	86,360,000	Pendapatan Daerah	0 Paket; 0 Paket	0	0
			0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor dengan kondisi baik 2 Buah; Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik 1 Lokasi	2 Buah; 1 Lokasi	122,000,000	Pendapatan Daerah	0 Buah ; 0 Lokasi	0	0
			0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil operasional laik jalan 5 Unit; Kendaraan operasional laik jalan 13 Unit	5 Unit; 13 Unit	87,100,000	Pendapatan Daerah	0 Unit; 0 Unit;	0	
			0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti; Indikator nilai hasil evaluasi AKIP; Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %; A Nilai; 100 %			0;0;0		
			0	0	6	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu 1 Laporan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselesaikan tepat waktu 1 Laporan; Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu 14 Laporan;	1 Laporan; 1 Laporan; 14 Laporan	5,202,000	Pendapatan Daerah	0 Laporan; 0 Laporan; 0 Laporan	0	
			1				Wajib								
			1	7			Sosial								

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)														
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif													
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)													
3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	1	7	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Cakupan keluarga miskin yang mampu melakukan usaha ekonomis produktif 75%; Cakupan eks Komunitas Adat Terpencil yang mampu melakukan usaha ekonomis produktif 70%; Cakupan keluarga miskin yang mendapatkan bantuan beras sejahtera sesuai dengan peruntukannya 100%; Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin 65,22%	75%; 70%; 100%; 65,22%				0														
															1	7	15	03	Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kabupaten	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) 130 KK; Jumlah KK dalam eks Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan UEP 10 KK;	130 KK;10 KK;	57,898,000	Pendapatan Daerah		0 KK; 0 KK;	0
															1	7	15	08	Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra) 15238 RTSPM;	15238 RTSPM;	279,533,000	Pendapatan Daerah		0 RTSPM;	0
																7	15	11	Penyediaan Program Rumah Sejahtera	Kabupaten	Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi 425 Buah;	425 Buah;	153,196,000	Pendapatan Daerah		0 Buah;	0
															1	7	15	12	Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)	Kabupaten	Persentase penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. HSS 100 %;	100 %;	327,925,000	Pendapatan Daerah		0 %;	0
4	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlanjar	Persentase anak terlanjar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1	7	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kabupaten	Cakupan anak terlanjar yang mendapatkan pelayanan terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar 85 %; Cakupan lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlanjar sesuai dengan standar 85 %; Cakupan korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana sesuai dengan standar 100 %; Cakupan relawan sosial yang berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana 90 %	85 %; 85 %; 100 %; 90%				0 %; 0 % ; 0% ; 0%														
		Persentase lanjut usia terlanjar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1	7	16	01	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dan Terlanjar	Kabupaten	Jumlah lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlanjar sesuai dengan standar 2794 Orang;	2794 Orang;	115,648,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0												

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	1	7	16	14	Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	Kabupaten	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana 100 %; Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana 76 Orang	100 %; 76 Orang	477,968,000	Pendapatan Daerah		0 %; 0 Orang	0
	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1	7	16	15	Pelayanan sosial bagi anak terlantar		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar 1117 Orang;	1117 Orang;	82,531,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1	7	17		Program pembinaan anak terlantar		Cakupan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar 85 %	85%				0%	
			1	7	17	04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Kabupaten	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar 1117 Orang;	1117 Orang	122,285,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
6	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	1	7	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Cakupan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar 60, 06%	60.06%				0%	
			1	7	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kabupaten	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar 196 Orang	196 Orang	154,888,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
7	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	1	7	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Kabupaten	Cakupan PMKS jalanan / tuna sosial lainnya yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 40,25 %; Cakupan perempuan rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 40%	40,25 %; 40 %				0 % ; 0 %	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	1	7	20	06	Peningkatan Pelayanan Sosial bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar	Kabupaten	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 25 Orang; Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 5 Orang; Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial sesuai dengan standar 70 %	25 Orang; 5 Orang; 70 %	111,050,000	Pendapatan Daerah		0 Orang; 0 Orang; 0 %	0
8	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	1	7	20	07	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Kabupaten	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar 60 Orang	60 Orang	70,008,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
9	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	1	7	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Cakupan Lembaga/Organisasi sosial yang aktif dalam pemberdayaan sosial 61,33%; Cakupan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial 85,52%; Persentase veteran dan janda veteran yang telah menerima santunan/ bantuan sosial 100 %	61,33 %; 85,52%; 100 %				0 %; 0 %	
	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	1	7	21	05	Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	Kabupaten	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima santunan/bantuan sosial 104 Orang	104 Orang	184,800,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	1	7	21	10	Pembinaan Karang Taruna	Kabupaten	Jumlah organisasi sosial yang aktif 25 Organisasi	25 Organisasi	144,277,500	Pendapatan Daerah		0 Organisasi	0
1			7	21	11	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kabupaten	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif 11 Orang	11 Orang	84,443,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0	
1			7	21	12	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kabupaten	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif 25 Orang	25 Orang	172,307,500	Pendapatan Daerah		0 Orang	0	
1			7	21	13	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3) 1 Lembaga	1 Lembaga	23,388,000	Pendapatan Daerah		0 Lembaga	0	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1 7 21	14 Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Kabupaten	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang aktif 5 Buah	5 Buah	3,200,000	Pendapatan Daerah		0 Buah	0
			1 7 21	15 Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Kabupaten	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) 14 Lembaga	14 Lembaga	19,038,000	Pendapatan Daerah		0 Lembaga	0
			1 7 21	16 Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	Kabupaten	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat) 1 Lembaga	1 Lembaga	6,880,000	Pendapatan Daerah		0 Lembaga	0
	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	7 26	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Cakupan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial 85,52%	85.52%				0%	
			7 26	01 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Kabupaten	Jumlah Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang aktif 148 Orang	148 Orang	4,344,289,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
TOTAL								8,010,065,000				0

Kandangan, Juni 2017

Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,



Hj. SITI ERVA, S.Sos. M.AP

Pemuda Muda

NIP. 19570328 198611 2 001